

PERAN INTERMEDIASI BANK PEMBANGUNAN DAERAH (BPD) TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH

BERLY (berly.chantel@gmail.com)

BENEDICTUS RAKSAKA MAHI

EUGENIA MARDANUGRAHA

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia, Indonesia

ABSTRACT

This study examines the impact of the intermediary role of 27 Regional Development Banks (RDB) on regional economic growth using county and city panel data for the 2015 - 2019 period. The test uses a fixed effect regression model with control variables of labour force participation rates, education, and local government spending. The findings of this study were the role of RDB intermediation has a significant positive effect in encouraging regional economic growth in all counties and cities. The study found that the impact of third party funds was higher if all of it disbursed into credit on the growth of real Gross Regional Domestic Product per capita. Third-party funds proven to increase capital accumulation channelled through credit, thereby encouraging economic growth. RDB has a role in reducing the obstacles to collecting funds in the district by distributing Third - party funds from the city to credit in the county. The results of the study shows that the impact of consumption and productive credit in county and city showed different results. In the county, consumer credit increases the purchasing power of households, while in the city, productive credit becomes physical capital accumulation with a higher multiplier so that it has a positive effect on economic growth. These results suggest that RDB should improve their active role in credit distribution, both in increasing the number and quality of intermediation, especially for productive use that is evenly distributed throughout the region. RDB needs to increase the capacity of lending, especially through increasing capital.

Keywords: regional development bank, intermediation, county and city, fixed effect model, regional economic growth

Penelitian ini menguji dampak peran intermediasi 27 BPD terhadap pertumbuhan ekonomi daerah menggunakan data panel kabupaten dan kota periode tahun 2015 - 2019. Pengujian menggunakan regresi model efek tetap dengan variabel kontrol tingkat partisipasi angkatan kerja, pendidikan, dan belanja pemerintah daerah. Hasil penelitian membuktikan peran intermediasi BPD berpengaruh positif signifikan mendorong pertumbuhan PDRB riil per kapita pada keseluruhan kabupaten dan kota. Penelitian menemukan dampak Dana Pihak Ketiga (DPK) lebih tinggi apabila seluruhnya disalurkan menjadi kredit terhadap pertumbuhan PDRB riil per kapita. DPK terbukti meningkatkan akumulasi modal yang disalurkan melalui kredit sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi. BPD berperan mengurangi kendala penghimpunan dana di kabupaten dengan mendistribusikan DPK dari kota menjadi kredit di kabupaten. Hasil penelitian dampak kredit konsumsi dan produktif di kabupaten dan kota menunjukkan hasil berbeda. Di kabupaten, kredit konsumsi meningkatkan daya beli rumah tangga, sedangkan di kota kredit produktif menjadi akumulasi modal fisik dengan multiplier lebih tinggi sehingga berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Mengacu konteks pembangunan Indonesia yang masih dalam tahap perkembangan, diperlukan peran aktif penyaluran kredit BPD baik peningkatan jumlah maupun kualitas intermediasi terutama untuk penggunaan produktif yang merata di seluruh daerah. BPD perlu meningkatkan kapasitas penyaluran kredit terutama melalui peningkatan permodalan.

Kata kunci: BPD, intermediasi, kabupaten dan kota, model efek tetap, pertumbuhan ekonomi daerah

PENDAHULUAN

Sejak tahun 2001 Indonesia mereformasi hubungan pemerintah pusat dan daerah dengan menerapkan otonomi daerah dan

desentralisasi fiskal untuk membiayai berbagai fungsi dan kegiatan pemerintah yang dilimpahkan pusat kepada daerah (UU No. 22 dan UU No. 25 tahun 1999).

Penerapan otonomi daerah merupakan “*the big bang decentralization policy*” (Hill dan Vidyattama, 2016) karena pelimpahan kewenangan dilakukan pada hampir seluruh aspek kepada kabupaten dan kota. Pemilihan kabupaten dan kota dengan pertimbangan efisiensi karena lebih dekat dengan masyarakat sehingga mampu memahami kebutuhan dan aspirasi publik. Selain itu juga, karena faktor politik yaitu untuk menjaga kesatuan Republik Indonesia karena kekuatan politik dan ekonomi lebih kecil dibandingkan provinsi.

Kabupaten dan kota memiliki karakteristik yang berbeda, antara lain luas wilayah kabupaten relatif lebih luas dengan jumlah kepadatan penduduk lebih rendah daripada kota. Dari aspek mata pencaharian penduduk, di kabupaten umumnya di bidang pertanian (agraris), sementara penduduk kota di bidang industri pengolahan, perdagangan dan jasa. Penduduk kabupaten relatif memiliki tingkat pendidikan dan kesehatan yang lebih rendah dibanding kota. Berdasarkan kegiatan ekonominya, pembangunan ekonomi lebih maju di kota didukung dengan penyediaan fasilitas publik yang lebih baik. Selain itu, aktivitas ekonomi di kota lebih heterogen dengan intensitas aktivitas yang lebih tinggi dibanding kabupaten. Hal tersebut yang menyebabkan rata-rata PDRB di kota lebih tinggi dibanding kabupaten.

Dikaitkan dengan peran perbankan dengan pembangunan ekonomi daerah, pemerintah mendirikan pendirian Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang bertujuan membantu melaksanakan pembangunan yang merata ke seluruh daerah di Indonesia. Namun, sejak penerbitan UU

Perbankan No. 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998, terjadi perubahan peran signifikan dari membiayai proyek pemerintah menjadi mengikuti kegiatan usaha bank umum sebagaimana bank lainnya. Dalam hal ini, BPD dituntut mampu memiliki daya saing dengan area kompetisi (playing field) yang sama.

BPD merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dimiliki mayoritas oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/ kota dalam provinsi tersebut. BPD dapat beroperasi dan membuka jaringan kantor di seluruh wilayah Indonesia. Namun, lebih memusatkan kegiatan bisnisnya pada nasabah di wilayah tempat BPD tersebut berada. BPD berperan meningkatkan perekonomian daerah melalui pencapaian program pemerintah daerah melalui penyaluran kredit produktif antara lain kepada BUMD dan pihak swasta sebagai pelaksana proyek penyediaan sarana/ prasarana pelayanan publik, serta mendorong pengembangan UMKM. Pengembangan keuangan daerah merupakan penentu penting bagi keberhasilan ekonomi, terutama melalui peningkatan usaha kecil (Tran *et al*, 2020; Kristianto, 2019) dan perkembangan industri (Lehmann & Wahl, 2021). Pemberlakuan otonomi daerah menuntut perbankan antisipatif karena pergeseran fungsi serta alokasi dana pembangunan berimplikasi pada peran perbankan di daerah (Agung, 2017).

Pemberian kewenangan kepada pemerintah kabupaten dan kota sebagai pemilik kewenangan tertinggi di daerah sekaligus sebagai pemegang saham BPD seharusnya mampu meningkatkan peran

Tabel 1.
Perkembangan Kredit dan Dana Pihak Ketiga (DPK) BPD Tahun 2011 - 2019 (Rp T)

Pos	Des'1 1	Des'1 2	Des'1 3	Des' 14	Des' 15	Des' 16	Des' 17	Des' 18	Des' 19
Aset	304	367	390	441	482	530	605	656	718
Kredit	176	219	265	302	335	359	393	426	470
DPK	235	279	288	336	361	384	449	477	532
LDR (%)	74,7	78,7	92,2	90,0	92,7	93,7	87,6	89,2	88,2

Sumber: OJK

strategis BPD sebagai mitra pemerintah daerah sekaligus motor percepatan pembangunan daerah. BPD dinilai memiliki pemahaman terhadap local wisdom, potensi, kondisi kultural dan sosiologis kedaerahan dengan nasabah yang menjadikan comparative advantage untuk menjadi juara di regional. Namun, di sisi lain BPD sebagai entitas BUMD masih memerlukan perbaikan terutama pada penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Budhisulistiyawati, Muryanto, & CN, 2016).

BPD terus melakukan perbaikan tercermin dengan keberhasilan meningkatkan rasio intermediasi tercermin dari peningkatan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) dan menurunkan ketergantungan pada dana pemda dari 22% pada Desember 2015 menjadi 16,9% Desember 2019 (BI). Namun di sisi penyaluran kredit, meskipun kredit produktif terus mengalami peningkatan, namun porsi masih didominasi oleh kredit konsumsi. Kredit Konsumsi sebesar 68,99% (2015) menjadi 69,26% (2019).

Dikaitkan dengan penerapan dua dekade otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di Indonesia, maka perlu dikaji sejauh mana peran intermediasi BPD terhadap perekonomian daerah. Dalam konteks Indonesia, terdapat beberapa penelitian dengan menggunakan pendekatan model King dan Levine (1993) pada level provinsi (Baroroh, 2012; Permana & Andjani, 2014; Devi, 2016; Zumaidah & Soelistyo, 2018) dan kabupaten/ kota dalam 1 provinsi (Rahman dan Chamelia; 2015; Dwiastuti, 2020). Hasil penelitian tersebut masih belum menemukan pola khusus keterkaitan antara karakteristik daerah dengan perkembangan perbankan dan pertumbuhan ekonomi regional.

Penelitian terkait peran intermediasi bank daerah yang utamanya melayani nasabah pada daerah tertentu dimana bank tersebut didirikan dilakukan oleh Permana dan Andjani (2014) dan Devi (2016) pada level provinsi. Permana dan Andjani (2014) meneliti pengaruh kredit BPD dan menemukan perbedaan pengaruh kredit BPD terhadap PDRB

provinsi di Indonesia. Kredit BPD mempengaruhi daerah dengan tingkat ekonomi di atas dan di bawah, namun tidak pada tingkat ekonomi menengah. Devi (2016) menemukan dampak positif dari kredit Bank Perkreditan Rakyat (BPR) terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi terutama pada provinsi yang memiliki banyak jaringan kantor BPR. Penelitian terkait peran intermediasi BPD terutama dampak kredit BPD terhadap pertumbuhan ekonomi daerah masih sangat terbatas, terutama dengan ruang lingkup kabupaten dan kota.

Sehubungan dengan hal tersebut, penelitian ini bermaksud melengkapi *research gap* dari penelitian Permana dan Andjani (2014). Pertama, menguji dampak peran intermediasi dengan menganalisis dampak maksimum penghimpunan dana terhadap pertumbuhan PDRB riil per kapita bila seluruh dana pihak ketiga tersalurkan melalui pembiayaan terhadap perekonomian. Kedua, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penyaluran kredit BPD untuk memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh terhadap peran intermediasi BPD. Ketiga, menguji dampak kredit yang dibagi berdasarkan jenis penggunaannya (konsumsi dan produktif) untuk memperoleh pemahaman apakah terdapat perbedaan dampak terhadap pertumbuhan PDRB riil per kapita. Keempat, menggunakan data panel dengan 3 *cross section* keseluruhan kabupaten dan kota, serta secara terpisah masing-masing kabupaten dan kota untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan dampak karena perbedaan karakteristik kabupaten dan kota. Analisis pada level kabupaten dan kota menjadi esensial karena kabupaten dan kota memiliki karakteristik dan ukuran perekonomian yang berbeda. Kelima, memperhitungkan pengaruh komponen *endowment* (tingkat partisipasi angkatan kerja dan pendidikan), serta belanja pemerintah daerah sebagai variabel kontrol pertumbuhan PDRB per kapita. Keenam, paska berakhirnya BPD *Regional Champion* pada 2014 maka perlu dikaji

lebih lanjut dengan menggunakan rentan waktu penelitian terkini. Untuk melengkapi *gap* tersebut, penelitian ini akan menggunakan rentan waktu 2015-2019.

Permasalahan yang akan dilihat dalam penelitian ini adalah menguji dampak peran intermediasi baik dari penghimpunan dana maupun penyaluran kredit BPD yang digunakan untuk konsumsi dan produktif terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/ kota dengan memperhitungkan faktor determinan pertumbuhan ekonomi daerah sebagai variabel kontrol. Selanjutnya penelitian ini juga akan menguji faktor determinan penyaluran kredit BPD. Untuk menjawab permasalahan tersebut pengujian dampak intermediasi dilakukan dengan 3 tahap. Pertama, pengujian terhadap pengaruh dana pihak ketiga terhadap pertumbuhan PDRB per kapita. Hal tersebut untuk meneliti dampak maksimum bila seluruh dana pihak ketiga tersalurkan melalui pembiayaan terhadap perekonomian. Kedua, pengujian pengaruh kredit terhadap pertumbuhan PDRB per kapita. Penelitian dampak kredit akan dibagi berdasarkan jenis penggunaannya (konsumsi dan produktif) untuk memperoleh pemahaman apakah terdapat perbedaan dampak terhadap pertumbuhan PDRB per kapita kabupaten dan kota. Ketiga, melakukan identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penyaluran kredit BPD untuk memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh terhadap peran intermediasi BPD sehingga penelitian ini dapat memberikan implikasi kebijakan terutama kepada pemerintah daerah selaku pemegang saham BPD sekaligus pemimpin daerah.

Penelitian ini disusun dalam enam bagian. Bagian pertama adalah pendahuluan yang membahas menjelaskan mengenai latar belakang penelitian, perumusan masalah penelitian, tujuan penelitian. Bagian kedua adalah tinjauan pustaka yang akan membahas mengenai intermediasi dan pertumbuhan ekonomi. Bagian ketiga adalah metode penelitian yang membahas mengenai pengukuran intermediasi, model penelitian, populasi

dan sampel penelitian, jenis dan sumber data, dan definisi operasional variabel. Bagian keempat membahas analisa serta pembahasan hasil penelitian ini. Bagian kelima adalah simpulan penelitian. Bagian terakhir adalah keterbatasan dan saran penelitian.

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Hubungan Intermediasi Perbankan dengan Pertumbuhan Ekonomi

Mengacu UU Perbankan No. 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998, Bank merupakan badan usaha yang melakukan intermediasi melalui penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan penyaluran kredit kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dengan terbukanya akses kegiatan operasional perbankan di seluruh Indonesia memungkinkan distribusi DPK menuju wilayah yang memiliki kemampuan penghimpunan dana rendah, namun memiliki tingkat pengembalian modal lebih tinggi. Perbankan menyalurkan DPK tersebut untuk kegiatan produktif maupun konsumtif. Ketersediaan kredit meningkatkan akumulasi modal untuk investasi perusahaan dan meningkatkan kemampuan konsumsi rumah tangga. Penyaluran kredit di daerah meningkatkan akumulasi modal sehingga secara jangka panjang mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan berkontribusi terhadap pertumbuhan perekonomian nasional. Schumpeter (1911) dalam King dan Levine (1993) menyatakan sektor keuangan yang berfungsi dengan baik diperlukan untuk mendorong pertumbuhan di sektor riil yang pada akhirnya mengarah pada pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi bergantung pada seberapa baik kedalaman/ penetrasi sektor keuangan sehingga meningkatkan supply layanan keuangan dan aksesibilitas kepada agen ekonomi di sektor riil.

Penelitian King & Levine (1993) menjadi katalis penelitian di sektor keuangan. King & Levine (1993) menggunakan data lintas negara dari 80

negara maju dan berkembang selama periode 1960-1989. Tingkat perkembangan keuangan suatu negara membantu memprediksi tingkat pertumbuhan ekonominya. Hasil tersebut konsisten dengan pandangan Schumpeter (1911) bahwa fungsi intermediasi oleh sektor keuangan mendorong pertumbuhan jangka panjang.

Berbagai penelitian peran intermediasi bank umum maupun bank daerah dengan pertumbuhan ekonomi daerah telah dilakukan. Penelitian dengan menguji peran intermediasi dengan menggunakan variable DPK dan Kredit dengan pertumbuhan ekonomi dilakukan oleh Xu (2016) yang menemukan kredit secara signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Namun, simpanan pihak ketiga ditemukan berpengaruh negatif, tetapi tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, variabel kontrol sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Chinweoke, Onyidikachi, & Nwabekee (2014) menemukan baik dari dana pihak ketiga dan kredit terbukti positif dan signifikan berpengaruh pada Pertumbuhan ekonomi Nigeria.

Hasil penelitian dengan yang menguji dampak kredit dilakukan Zhang, Wang & Wang (2012) menemukan hasil dari kredit berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi di 286 kota di China. Lebih lanjut, Balago (2014) dan Were *et al* (2012) juga membuktikan kredit bank berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan ekonomi di Nigeria dan Kenya.

Penelitian peran intermediasi perbankan di Indonesia, antara lain Zumaidah & Soelistyo (2018) membuktikan dana pihak ketiga dan kredit bank umum berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi-provinsi di Indonesia. Sementara pada level kabupten/kota, Rahman & Chamelia (2015) dan Dwiastuti (2020), membuktikan kredit berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/ kota masing-masing di Provinsi Jawa Tengah dan Kalimantan Selatan.

Sementara itu, studi empiris yang meneliti peran bank daerah dengan

pertumbuhan ekonomi provinsi dilakukan Permana & Andjani (2014), Hakenes, Hasan, Molyneux, & Xie (2015), dan Devi (2016). Permana dan Andjani (2014) menemukan perbedaan pengaruh kredit BPD terhadap PDRB provinsi. Kredit BPD mempengaruhi daerah dengan tingkat ekonomi di atas dan di bawah, namun tidak pada tingkat ekonomi menengah. Hakenes *et al* (2015) menemukan bahwa peran bank daerah Sparkasee di Jerman mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah terutama pada daerah yang memiliki kapasitas pendanaan yang rendah. Devi (2016) menemukan dampak positif dari kredit Bank Perkreditan Rakyat (BPR) terhadap pertumbuhan ekonomi daerah terutama pada daerah maju yang memiliki banyak jaringan kantor BPR.

Berdasarkan kajian studi empiris di atas, belum terdapat penelitian yang membahas terkait perilaku bisnis BPD baik dari penghimpunan dana dan penyaluran kredit yang masih didominasi oleh kredit konsumsi, serta belum terdapat penelitian yang dilakukan secara panel dengan ruang lingkup kabupaten/ kota seluruh Indonesia.

Faktor Determinan Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Pemilihan variabel penelitian mengacu pada 2 (dua) teori ekonomi utama. Pertama, teori pertumbuhan ekonomi daerah dari Armstrong dan Taylor (1993). Teori tersebut mengacu pada model pertumbuhan neoklasik Solow yang menyoroti peran penting dari tabungan dan sumber daya manusia. Pertumbuhan ekonomi daerah sangat tergantung dari tabungan masyarakat setempat dan dari masuknya modal dari wilayah lain. Semakin tinggi tingkat tabungan, maka akan semakin tinggi pula modal dan output yang dihasilkan. Kedua, Teori Keynesian menyatakan pengeluaran pemerintah, berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi melalui efek multiplier pada permintaan agregat.

Mengacu teori tersebut di atas dan studi empiris sebelumnya, maka pengujian hubungan antara peran intermediasi BPD

terhadap pertumbuhan ekonomi daerah akan menggunakan variabel kontrol. Variabel kontrol yang digunakan adalah tingkat partisipasi angkatan kerja (*kuantitas labour supply*) dan variabel kualitas pendidikan (Todaro dan Smith, 2015; Vidyattama, 2014). Desentralisasi fiskal merupakan faktor penting yang mempengaruhi pertumbuhan daerah (Martinez-Vasquez *et al*, 2015), untuk itu penelitian juga menggunakan belanja pemerintah daerah yang mendorong permintaan agregat (King & Levine, 1993; Siburian, 2017; Anwar, Sriyana, & Shidiqie, 2020; Gisore, 2020; Mose, 2021).

Faktor Determinan Penyaluran Kredit

POJK No.6/POJK.03/2016 mengatur seluruh kegiatan usaha dan pembukaan jaringan kantor BPD ditentukan berdasarkan besarnya modal inti sehingga semakin kuat modal BPD, maka semakin mampu menyediakan akses kepada masyarakat. Kapasitas bank dalam menyalurkan kredit juga dipengaruhi oleh kemampuan penghimpunan dana. Selain itu, faktor ketersediaan akses sebagai media interaksi antara bank dengan nasabah dalam bentuk jaringan kantor dan ATM (Anjungan Tunai Mandiri). Jaringan kantor diperlukan BPD karena sesuai dengan strategi dan karakteristik BPD yang fokus dengan pembiayaan ritel yang tersebar di daerah. Dengan kemajuan teknologi saat ini, ATM memiliki peranan dapat merepresentasi kehadiran fisik SDM bank dalam melayani kebutuhan nasabahnya.

Banyak penelitian terkait faktor determinan yang mempengaruhi penyaluran kredit dari faktor internal yang mempengaruhi penawaran kredit dan faktor eksternal yang mempengaruhi permintaan kredit. Faktor internal terdiri dari DPK dan modal dengan menggunakan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh positif signifikan (Pratama, 2017; Dyatama & Yuliadi, 2016; Rai & Purnawati, 2017; Romli & Alie, 2017; Nugraheni & Meiranto, 2013; dan Setiawan & Pratama; 2019), serta akses yang mendukung kegiatan operasional BPD yaitu ATM dan Jaringan Kantor (Sarma, 2012; Garg & Agarwal,

2014). Sementara itu, faktor eksternal yang digunakan yaitu PDRB per kapita (Utari *et al*, 2012).

Mengacu pada teori dan hasil penelitian sebelumnya, serta untuk memenuhi tujuan penelitian, maka selain menggunakan hipotesis yang telah ada, penelitian ini jug akan mengembangkan hipotesis yaitu pada pembagian kredit menjadi kredit konsumsi dan produktif, DPK berasal dari Pemda dan non Pemda, serta penggunaan Modal berdasarkan jumlah nominal.

Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian yaitu: 1) DPK berpengaruh positif terhadap pertumbuhan PDRB per kapita; 2) Kredit Konsumsi dan Kredit Produktif berpengaruh positif terhadap pertumbuhan PDRB per kapita; 3) DPK Pemda, DPK non Pemda, Modal, ATM, Jaringan Kantor, dan PDRB per kapita berpengaruh positif terhadap penyaluran kredit BPD.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan didalam penelitian ini merupakan data sekunder, yaitu data yang bersumber dari pihak ketiga yang dijelaskan pada Tabel 2. Penggunaan seluruh variabel dengan satuan Rupiah seluruhnya telah dideflasikan dengan Indeks Harga Konsumen dan dibagi dengan jumlah penduduk. Sementara itu, variabel dengan satuan unit juga dibagi dengan jumlah penduduk. Untuk mengurangi fluktuasi data yang berlebih, maka selain satuan dalam persentase, menggunakan logaritma natural (kredit, DPK, Modal, PDRB per kapita, Pendidikan dan Belanja).

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi penelitian model 1 adalah seluruh kabupaten dan kota sebanyak 508 kabupaten dan kota yang terdiri dari 415 kabupaten dan 93 kota (atau di luar 6 kabupaten/kota administratif di Jakarta karena desentralisasi fiskal di DKI Jakarta dalam level provinsi). Pemilihan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling*. Sampel penelitian berjumlah 448

pemda (362 kabupaten dan 86 kota) atau 88,19% dari total populasi. Penggunaan *purposive sampling* karena studi kasus yang diteliti merupakan kabupaten dan kota dengan desentralisasi fiskal dan terdapat penghimpunan DPK dan penyaluran kredit dari BPD. *Purposive sampling* dilakukan dengan penggunaan kriteria khusus dalam pemilihan sampel. Kriteria khusus tersebut antara lain: 1) Sampel adalah kabupaten/ kota dengan desentralisasi fiskal sejak periode 2015-2019. 2) Kabupaten/kota tersebut juga harus merupakan daerah penghimpunan DPK dan penyaluran kredit BPD. 3) Sampel adalah kabupaten/kota di mana BPS setempat telah menerbitkan Buku

Kabupaten/Kota Dalam Angka tahun 2016 - 2020 yang memuat data kabupaten/kota tersebut untuk tahun 2015 - 2019. 4) Sampel adalah kabupaten/kota di mana data yang dibutuhkan untuk penelitian ini tersedia pada Buku Kabupaten/Kota Dalam Angka tahun 2016 - 2020.

Populasi dan sampel penelitian model 2 adalah 27 BPD. Pemilihan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling*. Penggunaan *purposive sampling* karena BPD yang diteliti menerbitkan laporan keuangan tahunan periode 2015 - 2019 yang menyajikan data yang dibutuhkan untuk penelitian ini.

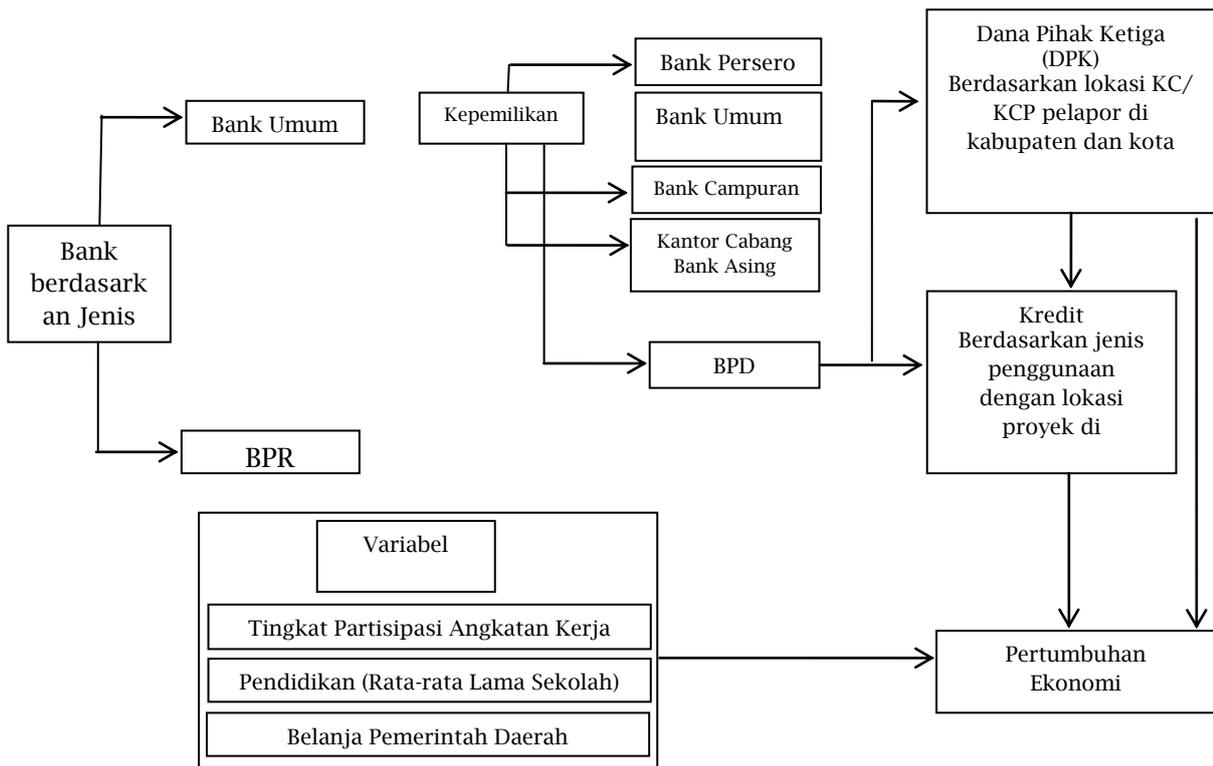
Model Penelitian

Tabel 2.
Definisi Variabel dan Sumber Data Penelitian

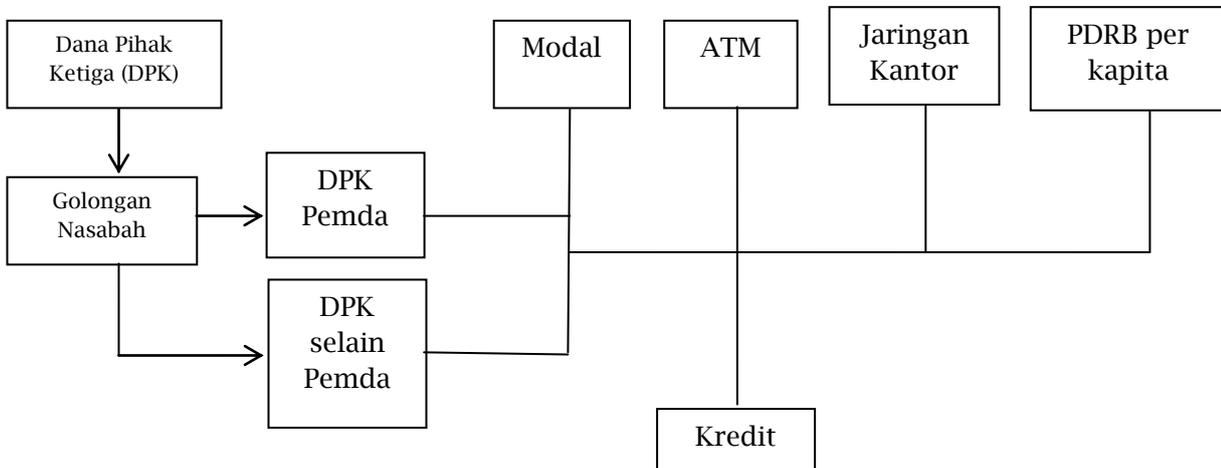
Variabel	Definisi	Sumber
Model 1		
Pertumbuhan PDB tanpa Migas riil per kapita (GPRDBit)	Pertumbuhan atas PDRB tanpa Migas atas dasar harga konstan 2010 setiap kabupaten/kota dibagi jumlah penduduk per kabupaten/kota sebagai proksi pertumbuhan ekonomi tahun t dikurangi tahun $t-1$ dibagi PDRB riil per kapita tahun t .	BPS
Dana Pihak Ketiga (DPK _{Kit})	Jumlah total dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada BPD dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito berdasarkan lokasi Kantor Cabang (KC)/ Kantor Cabang Pembantu (KCP) BPD penghimpunan dana.	BPD
Kredit Konsumsi (KreditKonsumsi _{it})	Jumlah kredit BPD yang digunakan untuk kegiatan konsumsi dengan lokasi proyek berada di kabupaten/kota.	BPD
Kredit Produktif (KreditProduktif _{it})	Jumlah total kredit BPD yang digunakan untuk kegiatan produktif terdiri dari Kredit Modal Kerja dan Kredit Investasi dengan lokasi proyek berada di kabupaten/kota.	BPD
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK _{Kit})	Proksi labour supply dihitung berdasarkan persentase penduduk usia 15 tahun keatas dalam kategori angkatan kerja terhadap total penduduk 15 tahun ke atas.	BPS
Pendidikan (Pendidikan _{it})	Rata-rata lama sekolah (RLS) yang dihitung dari jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal.	BPS
Belanja Pemerintah Daerah (Belanjait)	Seluruh realisasi belanja pemerintah daerah kabupaten dan kota	Kemenukeu
Model 2		
Kredit (Kredit _{it})	Jumlah total kredit yang disalurkan oleh 27 BPD	BPD
DPK Pemda (DPK _{Pemda} _{it})	Jumlah total simpanan dari nasabah pemerintah daerah yang dihimpun oleh BPD	BPD
DPK non Pemda (DPK _{nonPemda} _{it})	Jumlah total simpanan dari masyarakat selain pemerintah daerah yang dihimpun oleh BPD	BPD
Modal (Modal _{it})	Jumlah modal BPD yang mengacu ketentuan otoritas	BPD
ATM (ATM _{it})	Jumlah mesin ATM milik BPD	BPD
Jaringan Kantor (Jaringankantor _{it})	Jumlah seluruh jaringan kantor BPD selain ATM yang berfungsi untuk melakukan kegiatan transaksi perbankan, terdiri dari kantor cabang, kantor cabang pembantu, kantor kas, dan yang dipersamakan dengan jaringan kantor.	BPD
PDRB per kapita (PDRB _{it})	PDRB tanpa Migas atas dasar harga konstan 2010 provinsi dibagi jumlah penduduk dimana BPD didirikan dan dimiliki oleh pemerintah daerah	BPS

Pengujian menggunakan estimasi *ordinary least square* (OLS) dengan *fixed effect model* mempertimbangkan karakteristik setiap daerah diperkirakan mempunyai efek yang berbeda dan pemilihan estimasi terbaik mengacu pada hasil uji Hausman. Penggunaan metode OLS *fixed effect model* masih umum digunakan dalam penelitian terkait faktor-faktor determinan pertumbuhan ekonomi (Serra, Pazmino, Lindow, Sutton, & Ramirez,

2006). Penelitian pengujian dampak peran intermediasi BPD mengadopsi model King dan Levine (1993) yang telah membangun model analisis hubungan antara perkembangan keuangan (*financial development*) dan pertumbuhan ekonomi. Pemilihan variabel utama dan kontrol pembentukan pertumbuhan ekonomi mengacu teori pertumbuhan ekonomi Neoklasik dan Keynes yaitu akumulasi modal fisik dan investasi yang berasal



Gambar 1.
Kerangka Pikir Penelitian Model 1a dan 1b



Gambar 2.
Kerangka Pikir Penelitian Model 2

dari kredit, tenaga kerja (kuantitas maupun kualitas tenaga kerja) dan belanja pemerintah. Sementara itu, pemilihan variabel independen pada pengujian determinan penyaluran kredit BPD mengacu pada faktor internal Bank yaitu Dana Pihak Ketiga, Modal, ATM, dan Jaringan Kantor dan faktor eksternal Bank yaitu PDRB per kapita (Sarma, 2012; Nugraheni & Meiranto, 2013; Garg & Agarwal, 2014; Malede, 2014; Dyatama & Yuliadi, 2016; Fahmy, Rustam, & Asmayadi, 2016; Pratama, 2017; Rai & Purnawati, 2017; Romli & Alie, 2017; Setiawan & Pratama, 2019). Sementara itu, faktor eksternal yang digunakan yaitu PDRB per kapita (Utari *et al*, 2012; Timsina, 2017; Indriani, Prasetiono, & Fitria, 2021).

Sebagaimana disinggung dalam latar belakang, untuk menjawab *research gap* penelitian sebelumnya, maka ini menggunakan 3 model diawali dengan menganalisis dampak maksimum dana pihak ketiga terhadap pertumbuhan PDRB per kapita apabila seluruh dana tersebut disalurkan menjadi pembiayaan dalam perekonomian (Model 1a). Pengujian dilanjutkan dengan menganalisis dampak

penyaluran kredit berdasarkan jenis penggunaan terhadap pertumbuhan PDRB per kapita (Model 1b). Dari hasil perhitungan koefisien (koefisien dana pihak ketiga dengan koefisien kredit) akan diperbandingkan untuk melihat sejauh mana efektivitas kredit BPD terhadap pertumbuhan perekonomian daerah. Selanjutnya, setelah mengetahui dampak dari peran intermediasi, pengujian dilanjutkan dengan mengidentifikasi faktor determinan yang berpengaruh terhadap peningkatan kredit BPD (Model 2). Kerangka berpikir sebagai berikut.

Persamaan model secara lengkap sebagai berikut:

$$GPDRB_{it} = \alpha_0 + \alpha_1DPK_{it} + \alpha_2TPAK_{it} + \alpha_3Pendidikan_{it} + \alpha_4Belanja_{it} + \epsilon_{it} \quad (1a)$$

$$GPDRB_{it} = \alpha_0 + \alpha_1KreditKonsumsi_{it} + \alpha_2KreditProduktif_{it} + \alpha_3TPAK_{it} + \alpha_4Pendidikan_{it} + \alpha_5Belanja_{it} + \epsilon_{it} \quad (1b)$$

$$Kredit_{it} = \alpha_0 + \alpha_1DPK_{it} + \alpha_2DPKnonPenda_{it} + \alpha_3Modal_{it} + \alpha_4ATM_{it} + \alpha_5Jaringankantor_{it} + \alpha_6PDRB_{it} + \epsilon_{it} \dots\dots\dots (2)$$

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Hasil Regresi

Hasil regresi pada Tabel 4 menunjukkan

Tabel 3.
Hasil Pengujian Dampak Intermediasi BPD terhadap pertumbuhan PDRB riil per kapita

Y=	Hasil Pengujian Model 1a			Hasil Pengujian Model 1b		
	Kabupate n dan Kota	Kabupaten	Kota	Kabupaten dan	Kabupaten Kota	Kota
Pertumbuhan PDRB per kapita						
DPK	0.014572*** (0.0000)	0.011522*** (0.0001)	0.042044*** (0.0000)			
Kredit Konsumsi				0.009399** (0.0128)	0.014664*** (0.0020)	0.001235 (0.8046)
Kredit Produktif				0.002411** (0.0353)	0.001446 (0.2921)	0.008468*** (0.0000)
TPAK	0.000680*** (0.0009)	0.000816*** (0.0005)	-0.000446 (0.3646)	0.000704*** (0.0008)	0.000885*** (0.0002)	-0.000264 (0.5716)
Pendidikan	-0.081891*** (0.0001)	-0.070190*** 0.0019	-0.108674 (0.1022)	-0.056832*** (0.0034)	-0.063470*** (0.0030)	-0.040046 0.5243
Belanja	0.045910*** (0.0000)	0.042489*** 0.0000	0.051714*** (0.0003)	0.047115*** (0.0000)	0.045133*** (0.0000)	0.051809*** (0.0000)
F-stat	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
R-squared	0.323197	0.318819	0.387878	0.329958	0.332222	0.377992
Cross Section Observasi	448 2239	362 1810	86 430	448 2239	362 1809	86 430

variabel DPK dan kredit yang mencerminkan kekuatan intermediasi menunjukkan bahwa BPD sebagai lembaga intermediasi berperan positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Penghimpunan DPK disalurkan melalui kredit BPD yang digunakan baik untuk konsumsi maupun produktif pada keseluruhan kabupaten dan kota berpengaruh signifikan pada level signifikansi 1% - 5% terhadap pertumbuhan PDRB riil per kapita. Pengujian dana pihak ketiga terhadap pertumbuhan PDRB per kapita dilakukan untuk mengetahui dampak apabila seluruh dana pihak ketiga tersalurkan melalui pembiayaan terhadap perekonomian.

Pengujian dana pihak ketiga terhadap pertumbuhan PDRB per kapita dilakukan untuk mengetahui dampak apabila seluruh dana pihak ketiga tersalurkan melalui pembiayaan terhadap perekonomian. Berdasarkan hasil *robustness check* dengan melakukan uji coba penambahan jenis variabel kontrol, menunjukkan variabel Dana Pihak Ketiga berpengaruh positif terhadap pertumbuhan PDRB per kapita pada level signifikansi $\alpha = 1\%$ pada keseluruhan kabupaten dan kota, maupun secara terpisah pada masing-masing kabupaten dan kota.

Pengujian kredit terhadap pertumbuhan PDRB per kapita dan *robustness check* dengan melakukan uji coba penambahan jenis variabel kontrol, menunjukkan kredit BPD yang digunakan untuk konsumsi dan produktif berpengaruh positif terhadap pertumbuhan PDRB per kapita pada level signifikansi $\alpha = 5\%$ pada keseluruhan kabupaten dan kota. Pada keseluruhan kabupaten dan kota

menunjukkan kredit BPD yang digunakan untuk konsumsi dan produktif berpengaruh positif terhadap pertumbuhan PDRB per kapita pada level signifikansi $\alpha = 5\%$. Namun, terdapat perbedaan dampak kredit berdasarkan hasil uji secara terpisah pada kabupaten dan kota. Di kabupaten hanya kredit konsumsi yang berpengaruh positif signifikan. Sementara itu di kota hanya kredit Produktif yang berpengaruh positif signifikan terhadap Pertumbuhan PRDB riil per kapita.

Hasil regresi pengujian faktor determinan yang mempengaruhi kredit BPD pada Tabel 5, menunjukkan seluruh variabel independen berpengaruh signifikan pada level signifikansi 1% - 5% terhadap peningkatan kredit, kecuali Modal BPD yang berhubungan positif namun tidak signifikan.

Dampak Intermediasi BPD terhadap pertumbuhan PDRB riil per kapita

Dampak DPK apabila seluruhnya disalurkan menjadi kredit lebih tinggi terhadap pertumbuhan PDRB riil per kapita. Hal tersebut tercermin dari koefisien DPK (0,01457) dibandingkan gabungan koefisien kredit konsumsi dan kredit produktif BPD (0,01181). Hal tersebut menunjukkan bahwa apabila seluruh DPK dialokasikan BPD menjadi aset produktif terutama kredit pada sektor yang memiliki multiplier effect tinggi maka semakin berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Dalam implementasinya, Bank tidak menyalurkan seluruh DPK yang dihimpun. Pada Desember 2019 spread antara Harga Pokok Dana untuk Kredit (HPDK) dengan kredit BPD merupakan yang tertinggi yaitu

Tabel 5.
Hasil Pengujian Faktor Determinan yang mempengaruhi Kredit BPD

Y = Kredit BPD	DPK Pemda	DPK Non Pemda	Modal	ATM	Jaringan Kantor	PDRB
Koefisien	0,021779** *	0,324324** *	0,035733	0,019110**	3,451620**	0,339096 ***
Prob	(0,0012)	(0,0000)	(0,4865)	(0,0104)	(0,0129)	(0,0014)
F-stat	0.0000					
R-squared	0.995715					

5,48% dibandingkan dengan penempatan pada aset lainnya. Namun di sisi lain, BPD harus memastikan pemberian kredit berdasarkan prinsip kehati-hatian karena dapat berdampak pada kualitas kredit sehingga dapat berpengaruh pada biaya pencadangan kerugian yang menurunkan laba bank. Sementara itu, berdasarkan data Kemenkeu, tingkat pengembalian Obligasi Negara yang diterbitkan selama 2015 - 2019 sangat kompetitif dan tertinggi dengan risiko yang sangat rendah dengan kupon fixed rate sebesar 6,5% s.d 8,75%. Hal tersebut dapat menyebabkan BPD cenderung memilih SBN atau penempatan pada aset produktif lainnya dibandingkan menyalurkan kredit.

Hasil pengujian dampak kredit terhadap pertumbuhan PDRB riil per kapita menunjukkan pada keseluruhan kabupaten dan kota menunjukkan kredit BPD yang digunakan untuk konsumsi dan produktif berpengaruh positif terhadap pertumbuhan PDRB per kapita pada level signifikansi $\alpha = 5\%$. Namun, terdapat perbedaan dampak kredit berdasarkan hasil uji secara terpisah pada kabupaten dan kota. Di Kabupaten hanya kredit konsumsi yang berpengaruh positif signifikan. Sementara itu di Kota hanya kredit produktif yang berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan PRDB riil per kapita.

Kredit Konsumsi dan Produktif BPD berpengaruh positif terhadap pertumbuhan PDRB riil per kapita pada level signifikansi $\alpha = 5\%$ pada keseluruhan kabupaten dan kota. Interpretasi koefisien apabila kredit konsumsi naik 1% maka pertumbuhan PRDB riil per kapita akan naik 0,0094% (dengan asumsi variabel independen lainnya ceteris paribus). Sementara itu, apabila kredit produktif BPD naik 1% maka Pertumbuhan PDRB riil per kapita akan naik 0,0024%.

Koefisien kredit konsumsi lebih tinggi dibandingkan kredit produktif dapat dijelaskan karena perilaku penyaluran kredit BPD masih didominasi oleh kredit konsumsi. Rata-rata porsi penyaluran kredit konsumsi per kapita sebesar 77,21% lebih tinggi

dibandingkan kredit produktif 22,79%. Hal tersebut menyebabkan rata-rata kredit konsumsi per kapita sebesar Rp1,16 juta lebih tinggi dibandingkan kredit produktif per kapita sebesar Rp343 ribu.

Rendahnya perilaku pemberian kredit produktif dengan rata-rata sebesar 27% dari total kredit disebabkan antara lain karena keterbatasan kompetensi sumber daya manusia dalam pengelolaan manajemen risiko, mendukung temuan Budhisulistiyawati *et al* (2015). Hal tersebut tercermin dari rasio NPL kredit modal kerja dan kredit investasi jauh lebih tinggi dibandingkan kredit konsumsi.

Perbedaan Dampak Kredit di Kabupaten dan Kota

Selama periode 2015 - 2019, rata-rata penyaluran kredit di kabupaten sebesar Rp679 miliar, sementara itu rata-rata penghimpunan DPK di kabupaten sebesar Rp516 miliar. Penyaluran kredit BPD di kabupaten berasal dari aliran penghimpunan DPK di kota.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori Neoklasik bahwa BPD berperan mendistribusikan aliran modal dari kota (daerah yang lebih kaya) kepada kabupaten karena produktivitas marjinal modal yang lebih tinggi. BPD berperan mengurangi kendala penghimpunan dana di kabupaten. Dalam jangka panjang hal tersebut akan meningkatkan akumulasi modal di kabupaten sehingga mendorong Pertumbuhan ekonomi.

Di kabupaten hanya Kredit Konsumsi yang berpengaruh positif dengan interpretasi koefisien apabila kredit konsumsi naik 1% maka pertumbuhan PRDB riil per kapita akan naik 0,0146% (dengan asumsi variabel independen lainnya ceteris paribus). Kredit Konsumsi tersebut mampu meningkatkan daya beli sehingga berpengaruh positif terhadap pertumbuhan PDRB per kapita. Sementara di kota, hanya kredit produktif yang berpengaruh positif dengan interpretasi koefisien apabila kredit produktif naik 1% maka pertumbuhan PRDB riil per kapita akan naik 0,00846% (dengan asumsi

variabel independen lainnya ceteris paribus). Di kota kredit produktif menjadi akumulasi modal fisik dari fungsi produksi yang memberikan multiplier lebih tinggi sehingga berpengaruh positif terhadap pertumbuhan PDRB riil per kapita.

Jumlah penyaluran kredit BPD baik untuk konsumsi maupun produktif di kota lebih tinggi dibandingkan di kabupaten. Rata-rata kredit konsumsi dan produktif per kota sebesar Rp836 miliar dan Rp372 miliar, lebih tinggi dibandingkan kredit yang disalurkan per kabupaten sebesar Rp506 miliar (kredit konsumsi) dan Rp173 miliar (kredit produktif).

Jumlah rata-rata kredit konsumsi per kabupaten sebesar Rp506 miliar atau lebih rendah dibandingkan penyaluran di masing-masing kota sebesar Rp836 miliar. Namun, dikaitkan dengan ukuran ekonomi yang masih rendah dibanding dengan kota sehingga rasio kredit konsumsi di kabupaten terhadap PDRB kabupaten lebih tinggi. Rata-rata rasio kredit konsumsi terhadap PDRB kabupaten sebesar 3,47%, sedangkan di kota sebesar 2,94%. Hal tersebut menunjukkan BPD belum berperan optimal menggali sumber potensial perekonomian terutama sektor UMK di kabupaten.

Hasil pengujian terhadap dampak kredit konsumsi dan produktif di kabupaten dan kota mampu menjelaskan perbedaan karakteristik kabupaten dan kota. Kota lebih atraktif dalam menarik investasi karena faktor endowment yang lebih baik dibanding kabupaten antara lain ketersediaan aglomerasi ekonomi yang mendorong perubahan struktural ekonomi menjadi sektor modern (manufaktur dan jasa), kemudahan akses fasilitas publik, dan kelembagaan. Sementara itu, faktor endowment kabupaten masih mengandalkan sektor primer (pertanian, perkebunan, dan pertambangan) dengan wilayah yang lebih luas dengan jumlah kepadatan penduduk lebih rendah daripada kota. Di sisi lain penyediaan fasilitas publik masih terbatas dengan kualitas sumber daya manusia secara umum yang lebih

rendah. Hal tersebut menyebabkan output rata-rata PDRB di kabupaten lebih rendah daripada PDRB kota.

Mengacu pada hasil penelitian dampak kredit di atas, temuan ini mendukung hasil penelitian Beck & Levine (1993), Baroroh (2012), Rahman (2015), Hakenes (2015), Devi (2016), Zumaidah & Soelistyo (2018); Dwiastuti (2020) yang menunjukkan ketersediaan akses dari perbankan mampu mendorong penggunaan jasa keuangan perbankan sehingga berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah (supply-leading hypothesis). Temuan ini juga mendukung argumen atas temuan dari Meslier-Crouzill *et al* (2012) menyatakan bahwa hubungan antara kredit dengan pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi tahapan pembangunan daerah dan dikonfirmasi dengan pentingnya *threshold effect* yaitu jumlah volume kredit yang disalurkan agar pengaruh BPD menjadi lebih efektif.

Temuan ini juga membuktikan perilaku penyaluran kredit produktif di kota menunjukkan akumulasi modal fisik menjadi faktor produksi sehingga memberikan multiplier effect yang lebih besar dibanding kredit konsumsi. Penyaluran kredit produktif BPD dengan rata-rata hanya 27% dari total kredit dan kemudian disalurkan kepada kota sebesar 68% terbukti memberikan multiplier effect terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Hal tersebut mendukung temuan Devi (2016) dan Kristinto (2019) yang menunjukkan dampak positif dan signifikan dari kredit BPR yang memberikan kredit kepada UMK terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Temuan ini melengkapi argumen penelitian Permana & Andjani (2014) yang menemukan dampak kredit hanya positif di daerah dengan tingkat ekonomi di atas dan di bawah, namun tidak pada tingkat ekonomi menengah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kredit produktif signifikan berdampak positif mendorong pertumbuhan ekonomi kota. Sementara itu, di kabupaten kredit konsumsi yang mendorong pertumbuhan ekonomi kabupaten.

Secara umum hasil penelitian

membuktikan dampak kredit terhadap pertumbuhan ekonomi daerah bergantung pada jumlah penyaluran dan jenis penggunaan kredit. Semakin tinggi jumlah penyaluran kredit BPD berdampak lebih besar pada pertumbuhan ekonomi. Selain itu, dampak kredit ditentukan juga oleh kualitas penggunaan penyaluran kredit. Kredit yang digunakan untuk penggunaan produktif memberikan multiplier effect yang lebih tinggi dibandingkan kredit konsumsi. Peran penting intermediasi perbankan dalam meminimalkan biaya transaksi dan informasi asimetris menunjukkan bahwa BPD mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Untuk itu, BPD harus meningkatkan intermediasi keuangan dengan meningkatkan supply layanan keuangan dan aksesibilitas kepada agen ekonomi di sektor riil.

Hasil pengujian dampak variabel kontrol tenaga kerja, pendidikan, dan belanja pemerintah daerah terhadap pertumbuhan PDRB riil per kapita menunjukkan pada keseluruhan kabupaten dan kota, variabel tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) dan belanja pemerintah daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, variabel pendidikan berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan PDRB per kapita karena masih rendahnya rata-rata pendidikan penduduk berusia 15 tahun ke atas yaitu hanya menyelesaikan pendidikan selama rata-rata 8 tahun.

Terdapat perbedaan pengaruh TPAK pada level kabupaten dan kota terhadap pertumbuhan PDRB riil per kapita. Di kabupaten, TPAK berpengaruh positif signifikan pada level signifikansi 1%, sedangkan di kota negatif tidak signifikan. Perbedaan tersebut mencerminkan kemampuan kabupaten dalam menyerap labour supply dalam perekonomian meskipun di kabupaten cenderung masih didominasi sektor informal UMKM terutama pada sektor primer terutama pertanian dan sektor perdagangan eceran. Selain itu, peningkatan pelayanan fasilitas publik yang memerlukan jumlah tenaga kerja sehingga mampu menyerap labour

supply kemudian mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Sementara itu, labour supply di kota dan rata-rata lama sekolah di kota berpengaruh negatif signifikan terhadap kemajuan ekonomi. Hal tersebut dapat dijelaskan oleh komposisi TPAK yang terdiri oleh pengangguran terbuka lebih tinggi di perkotaan dibanding kabupaten. Berdasarkan data BPS persentase pengangguran di perkotaan sebesar 6,44% (2018) dan 6,29% (2019) lebih tinggi, sedangkan di Perdesaan sebesar 3,97% (2018) dan 3,92% (2019).

Tingginya pengangguran terbuka di kota, didominasi oleh jumlah penganggur terbuka dengan pendidikan SMA s.d S3. Hal tersebut disebabkan ekspektasi reservation wage yang diharapkan oleh pencari kerja lebih tinggi dibanding yang diberikan oleh pemberi tenaga kerja. Selain itu, Indonesia mengalami job mismatch antara pendidikan dan jenis pekerjaan sehingga terjadi gap keahlian/ keterampilan yang berpengaruh terhadap produktivitas (Wisana, 2020).

Variabel kontrol belanja pemerintah daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah pada seluruh level penelitian. Penelitian ini mendukung teori Keynes dan penelitian sebelumnya (Siburian 2017; Anwar *et al.*, 2020; Gisore, 2020; Mose, 2021) bahwa intervensi pemerintah melalui belanja mampu meningkatkan pertumbuhan output.

Berdasarkan nilai koefisiennya, meskipun rasio belanja di kota lebih rendah dibandingkan di kabupaten, namun dampak total belanja di kota lebih tinggi terhadap pertumbuhan PDRB. Hal tersebut tercermin dari rasio belanja terhadap PDRB di kota sebesar 5,36% dan di kabupaten sebesar 10,77% dan rasio belanja riil per kapita terhadap PDRB riil per kapita di kota 7,23% lebih rendah dibandingkan di kabupaten 14,01%. Berdasarkan jenisnya, belanja modal di kota berkisar 23% dan di kabupaten berkisar 21% dari total belanja. Dampak belanja di kota lebih tinggi karena kondisi struktural di kota lebih baik

dibandingkan di kabupaten, baik dari infrastruktur, kelembagaan, SDM, dan pertumbuhan sektor ekonomi modern sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi.

Faktor Determinan yang mempengaruhi Kredit BPD

Hasil penelitian membuktikan bahwa penyaluran kredit BPD di sisi supply terutama dipengaruhi oleh DPK baik Pemda maupun non Pemda, ketersediaan ATM dan jaringan kantor. Temuan ini mendukung hasil penelitian Fahmy et al. (2016) dan Indriani et al. (2021). Berdasarkan koefisien, DPK non Pemda lebih tinggi dibandingkan DPK Pemda karena porsi DPK non Pemda lebih tinggi dengan rata-rata berkisar 82%, sisanya 18% oleh DPK Pemda. Hal tersebut menunjukkan kemampuan penghimpunan dana BPD nasabah selain Pemda terutama perseorangan yang relatif stabil dengan tren terus meningkat. Sementara itu, koefisien jaringan kantor lebih tinggi dibandingkan ATM karena proses akuisisi calon debitur dan proses underwriting memerlukan interaksi langsung dengan nasabah untuk memastikan penerapan prinsip kehati-hatian. Selain itu, melalui penambahan jaringan kantor yang sesuai dengan target potensial nasabah Bank akan memudahkan Bank melakukan clustering nasabah dalam melakukan edukasi, pengembangan pemasaran dan strategi bisnis UMKM selaku debitur Bank yang berdampak kepada peningkatan kredit BPD.

Sementara itu, variabel Modal berhubungan positif, namun tidak signifikan mempengaruhi penyaluran kredit BPD. Hal tersebut disebabkan rendahnya porsi Modal BPD terhadap kredit. Hasil regresi ini membuktikan kendala penambahan modal BPD dari masing-masing pemerintah daerah karena panjangnya proses birokrasi dari pembahasan sampai dengan penerbitan peraturan daerah penambahan penyertaan modal. Di sisi lain, 1

BPD dimiliki oleh pemprov dan pemkab/ pemkot se-provinsi sehingga

dapat dimiliki oleh 44 pemda (BPD Papua dan Papua Barat). Sementara itu, dari demand side, penyaluran kredit dipengaruhi secara signifikan oleh PDRB per kapita. Temuan ini mendukung hasil penelitian Malede (2014) dan Timsina (2017). Interpretasi koefisien hasil pengujian apabila PDRB per kapita naik 1% akan meningkatkan kredit sebesar 0,339%.

SIMPULAN

Peran intermediasi BPD secara signifikan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Penghimpunan DPK disalurkan oleh BPD melalui kredit BPD yang digunakan baik untuk konsumtif maupun produktif pada keseluruhan kabupaten dan kota berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan PDRB riil per kapita. Dampak DPK apabila seluruhnya dialokasikan BPD menjadi kredit pada sektor yang memiliki multiplier effect tinggi maka semakin berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Lebih rendahnya koefisien DPK dibandingkan kredit disebabkan trade off antara tingkat pengembalian dan risiko penyaluran kredit dengan penempatan pada aset lainnya.

Seluruh jenis kredit signifikan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan PDRB riil per kapita di keseluruhan kabupaten dan kota. Dampak kredit di kabupaten dan kota menunjukkan hasil berbeda. Meskipun kredit konsumsi dan produktif lebih besar disalurkan di kota, namun memberikan dampak yang berbeda di masing-masing kabupaten dan kota. Di kabupaten kredit konsumsi mampu meningkatkan daya beli sehingga berpengaruh positif terhadap pertumbuhan PDRB per kapita. Sementara di kota, kredit produktif menjadi akumulasi modal fisik dari fungsi produksi yang memberikan multiplier lebih tinggi sehingga berpengaruh positif terhadap pertumbuhan PDRB riil per kapita.

Hasil penelitian membuktikan kredit mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah berdasarkan 2 aspek yaitu jumlah penyaluran dan jenis

penggunaan kredit. Semakin tinggi jumlah penyaluran kredit BPD berdampak lebih besar pada pertumbuhan ekonomi. Selain itu, dampak kredit ditentukan juga oleh kualitas penyaluran kredit. Kredit yang digunakan untuk penggunaan produktif memberikan multiplier effect yang lebih tinggi dibandingkan kredit konsumsi. Mengacu konteks pembangunan di Indonesia yang masih dalam tahap perkembangan sehingga diperlukan peran aktif penyaluran kredit BPD terutama terutama terhadap sektor riil.

BPD perlu meningkatkan perilaku penyaluran kredit baik secara nominal maupun per jenis penggunaan di seluruh level kabupaten dan kota diawali dengan peningkatan kapasitas internal BPD terutama melalui peningkatan permodalan yang terbukti masih rendah. Diperlukan perubahan mekanisme proses penyertaan modal dengan memangkas proses birokrasi panjang setiap kali pemerintah daerah akan melakukan penyertaan modal. Selain itu, untuk memperkuat daya saing, perlu dilakukan konsolidasi BPD di bawah satu holding BPD atau pembentukan holding berdasarkan wilayah regional. BPD perlu meningkatkan kemampuan berkompetisi dengan bank lainnya melalui investasi penyediaan infrastruktur pendukung guna mendorong penyediaan akses kepada masyarakat dan peningkatan prinsip kehati-hatian. Bagi otoritas, diperlukan evaluasi yang menyeluruh sesuai dengan target kebijakan program Transformasi BPD yang ditetapkan dengan melibatkan partisipasi aktif seluruh kepala daerah selaku pemimpin daerah sekaligus pemegang saham BPD.

KETERBATASAN DAN SARAN

Keterbatasan penelitian ini adalah memilih kabupaten dan kota karena karakteristik yang berbeda dan merupakan basis desentralisasi fiskal. Namun, mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan dan terdapat kesenjangan pembangunan yang cukup tinggi antar daerah. Maka penulis menyarankan pada penelitian selanjutnya dapat melakukan clustering sampel penelitian berdasarkan aktivitas

ekonomi sehingga dapat memberikan pengukuran yang lebih akurat. Selain itu, mempertimbangkan periode program Transformasi BPD OJK sejak tahun 2019 hingga 2024, maka penulis juga menyarankan untuk melakukan penelitian yang berkelanjutan agar diperoleh informasi berharga terkait peran intermediasi BPD terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, J. (2017). Kinerja dan fungsi intermediasi perbankan pasca krisis dan era otonomi daerah : Overview, *Bulletin of Monetary Economics and Banking*, 3(2), 3-5.
- Anwar, A., Sriyana, J., & Shidiqie, J. S. A. (2020). The impact of government spending spillovers on regional economic growth. *Montenegrin Journal of Economics*, 16(2), 59-76.
- Armstrong, H.W., & Taylor, J. (2000). *Regional economics and policy*, 3rd Edition.
- Baroroh, U. (2012). Analisis sektor keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi regional di wilayah Jawa: Pendekatan model Levine. *Etikonomi*, 11(2), 180-195.
- Budhisulistiyawati, A., Muryanto, Y. T., & CN, A. S. (2016). Strategi pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) persero untuk mewujudkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. *Privat Law*, 3 (2), 56-66.
- Chinweoke, N. W. A. E. Z. E., Onydikachi, M. I. C. H. A. E. L., & Nwabekee, C. E. (2014). Financial intermediation and economic growth in Nigeria (1992-2011). *The Macrotheme Review*, 3(6), 124-142.
- Devi, L. (2016). The impact of rural bank loans on regional economic growth and regional poverty in Indonesia. *New Zealand Association of Economists-NZAE*, WP, 10, 1-25.
- Dwiastuti, N. (2020). Pengaruh kredit perbankan terhadap pertumbuhan ekonomi dan hubungannya dengan kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat. *Prosiding Seminar Akademik Tahunan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 73-91.
- Dyatama, A. N., & Yuliadi, I. (2015).

- Determinan Jumlah Pembiayaan Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 16 (1), 73-83.
- Fahmy, O. M., Rustam, M., & Asmayadi, E. (2016). Pengaruh keuangan inklusif terhadap kredit yang disalurkan pada sektor usaha mikro, kecil dan menengah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan*, 5(2), 118-135.
- Garg, S., & Agarwal, P. (2014). Financial inclusion in India—a Review of initiatives and achievements. *IOSR journal of business and Management*, 16(6), 52-61.
- Gisore, M. (2020). *Analysis of county government expenditure and county economic growth in Kenya*. Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=4301780> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4301780>
- Hakenes, H., Hasan, I., Molyneux, P., & Xie, R. (2015). Small banks and local economic development. *Review of Finance*, 19(2), 653-683.
- Hill, H., & Vidyattama, Y. (2016). Regional development dynamics in Indonesia before and after the 'Big Bang' decentralization. *The Singapore Economic Review*, 61(2).
- Indriani, A., Prasetyono, P., & Fitria, S. (2021). Inklusi keuangan dan penyaluran kredit UMKM di Jawa Tengah. *Jurnal Studi Manajemen Organisasi*, 16(1), 27-34.
- King, Robert G., and Ross Levine. (1993). Finance and growth: Schumpeter might be right. *The Quarterly Journal of Economics* 108, No. 3: 717-37.
- Kristianto, D. (2019). Credit for MSMEs, private credit, and regional economic growth in Indonesia: a panel vector autoregressive analysis. *Info Artha*, 3(2), 85-100.
- Kunanti, N. P., & Adry, M. R. (2020). Pengaruh financial development terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan*, 2(1), 43-48.
- Levine, R. (1997). Financial development and economic growth views and agenda. *Journal of Economic Literature*, 35, 688-726.
- Maledo, M. (2014). Determinants of commercial banks lending: evidence from Ethiopian commercial banks. *European Journal of Business and Management*, 6(20), 109-117.
- Mankiw, N. G. (2020). *Principles of macroeconomics*. Cengage Learning.
- Martínez-Vázquez, J., Lago-Peñas, S., & Sacchi, A. (2017). The impact of fiscal decentralization: A survey. *Journal of Economic Surveys*, 31(4), 1095-1129.
- Meslier-Crouzille, C., Nys, E., & Sauviat, A. (2012). Contribution of rural banks to regional economic development: Evidence from the Philippines. *Regional Studies*, 46(6), 775-791.
- Mose, N. (2021). Determinants of regional economic growth in Kenya. *African Journal of Business Management*, 15(1), 1-12.
- Nugraheni, P. P., & Meiranto, W. (2013). Pengaruh Faktor Internal Bank dan Sertifikat Bank Indonesia terhadap Penyaluran Kredit Perbankan Di Indonesia. *Diponegoro Journal of Accounting*, 2(4) 528-538,
- Permana, Y. H., & Andjani, I. Y. (2014). Financial efficiency performance of regional development bank (RDB) to support regional economy in Indonesia. *International Journal of Economic Sciences*, 2014(4), 53-69.
- Popov, A. (2018). Evidence on finance and economic growth. *Handbook of finance and development*, 63-104.
- Rahman, Y. A., & Chamelia, A. L. (2015). Faktor-faktor yang mempengaruhi PDRB kabupaten/kota Jawa Tengah tahun 2008-2012. *JEJAK: Jurnal Ekonomi dan Kebijakan*, 8 (1), 88-89.
- Rai, I. A. A., & Purnawati, N. K. (2017). Faktor-faktor yang mempengaruhi kredit pada bank umum swasta nasional (BUSN) Devisa. *E-journal manajemen Unud*, 6(11), 5941-5969 .
- Romli, H., & Alie, M. (2017). Determinan Penyaluran Kredit dan Implikasinya Terhadap Kinerja Profitabilitas Bank yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2014. *Jurnal Manajemen dan Bisnis Sriwijaya*, 15(1), 62-76.
- Sarma, M. (2012). Index of Financial Inclusion—A measure of financial sector inclusiveness. Centre for International Trade and Development, *School of International Studies Working Paper Jawaharlal Nehru University*. Delhi,

- India.
- Serra, M. I., M. Pazmino, G. Lindow, B. Sutton, and G. Ramirez. (2006). Regional convergence in Latin America. *IMF Working Paper* No. 06/125 May 01.
- Setiawan, R., & Pratama, A. A. P. (2019). Modal, Tingkat Likuiditas Bank, NPL dan Pertumbuhan Kredit Perbankan Indonesia (Capital, Level of Liquidity, NPL and Lending Growth of Indonesian Banks). *Matrik: Jurnal Manajemen, Strategi Bisnis dan Kewirausahaan*, 96-107.
- Siburian, M. E. (2017). Regional growth and fiscal decentralization a case of Indonesia. *International Journal of Sciences: Basic and Applied Research*, 36(3), 271-290.
- Timsina, N. (2017). Determinants of bank lending in Nepal. *NRB Economic Review*, 20(1), 22-42.
- Todaro, Michael P., Smith, Stephen C. (2015). *Economic Development* (Ed. 12th). Harlow: Pearson.
- Vidyattama, Y. (2014). Issues in applying spatial autocorrelation on Indonesia's provincial income growth analysis. *Australasian Journal of Regional Studies*, The, 20 (2), 375-402.
- Tran, V. T., Walle, Y. M., & Herwartz, H (2020). The impact of local financial development on firm growth in Vietnam: Does the level of corruption matter?, *European Journal of Political Economy*, (62).
- Wisana, D. G. K. (2020). *Ketenagakerjaan Indonesia dan perkembangan teknologi informasi: analisis tren dan kebijakan. Buku terobosan baru atas perlambatan ekonomi rujukan untuk sebuah kebijakan perekonomian*. Jakarta: Elex Media Komputindo
- Xu, H. (2016). Financial intermediation and economic growth in China: new evidence from panel data. *Emerging Markets Finance and Trade*, 52(3), 724-732.
- Zhang, J., Wang, L., & Wang, S. (2012). Financial development and economic growth: Recent evidence from China. *Journal of Comparative Economics*, 40(3), 393-412.
- Zumaidah, L. N., & Soelistyo, A. (2018). Pengaruh total aset, dana pihak ketiga, dan kredit pada bank umum terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi-provinsi di Indonesia pada tahun 2013-2016. *Jurnal Ilmu Ekonomi JIE*, 2(2), 251-263.